

**PERANAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM MEMINIMALISIR
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN SUMBAWA**

Selmiana Sapitri

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar

selmianasafitri@gmail.com

Liawati

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar

liawati051101@gmail.com

Saindra

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar

Saindraindra5124@gmail.com

Siti Nur Hidayati

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar

siti.nurhidayati@stainwsamawa.ac.id

Abstract

Income inequality is still a problem in the Indonesian economy, especially in Sumbawa Regency. In order to realize the welfare of the community evenly, the Sumbawa district government seeks to reduce the income inequality rate between sub-districts in Sumbawa district. Community financial institutions are expected to help the economy of the poor so that economic income equality will be realized so as to minimize inequality. The purpose of the study was to determine the role of financial institutions in minimizing income inequality. In Sumbawa Regency. This research is a type of qualitative research. The results showed that financial institutions play a significant role in income inequality in Sumbawa Regency.

Keyword: *Finansial institutions, Inequality, Income.*

Abstrak

Ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumbawa. Untuk mencapai perlindungan sosial yang merata, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa. Lembaga keuangan masyarakat harus mampu mendukung

perekonomian masyarakat miskin agar pemerataan pendapatan ekonomi dapat mengurangi kesenjangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran lembaga keuangan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam permasalahan ketimpangan pendapatan di kabupaten Sumbawa.

Kata kunci: Lembaga Keuangan, Ketimpangan, Pendapatan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, ketimpangan ekonomi, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, serta tingkat kemiskinan, yaitu jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, keduanya merupakan dua masalah besar. Ketimpangan tidak dapat dihilangkan, namun hanya dikurangi sampai pada tingkat yang dapat ditoleransi oleh sistem sosial tertentu sehingga seiring dengan pertumbuhan sistem, keharmonisan dalam sistem tetap terjaga.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ketimpangan selalu terjadi, baik di negara miskin, berkembang, atau bahkan negara maju. Perbedaannya hanya pada tingkat ketimpangan di masing-masing negara. Lembaga keuangan khususnya perbankan memegang peranan penting melalui fungsi intermediasinya. Memiliki akses terhadap bank pasti akan mendorong masyarakat untuk membeli asuransi, deposito, dan tabungan. Masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dapat menginvestasikannya di bank. Demikian pula, seseorang yang tidak memiliki uang dapat meminjam dari bank dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan rentenir.

Oleh karena itu, sistem keuangan yang efektif dan inklusif memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi,

mengurangi kemiskinan dan menyamakan pendapatan. Sistem ini juga mengintegrasikan masyarakat ke dalam pertumbuhan ekonomi.

Inti dari pembangunan ekonomi dan permasalahan perekonomian adalah ketimpangan pendapatan.¹ Ketimpangan pendapatan mengacu pada tidak meratanya pembangunan yang terjadi di suatu wilayah, dan tidak semua sektor masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.

Ketimpangan pendapatan diselesaikan dengan Ginirate. Indeks ini mengukur apakah distribusi pendapatan dalam suatu wilayah tidak merata. Jika indeks Gini suatu daerah mendekati angka 1 berarti ketimpangan sangat rendah.²

Adapun alasan LKM dapat mengentaskan ketimpangan pendapatan karena LKM dibentuk dari lapisan masyarakat bawah dan bukan dari perangkat perencana pemerintah, melainkan dibentuk oleh tenaga professional . Selain itu juga menyatakan bahwa LKM berperan dalam megentaskan kemiskinan dengan memberi pinjaman modal bagi usaha kecil yang sedang merintis³. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa UMKM berperan penting dalam perekonomian karena keberadaannya yang cukup dominan.

Berdasarkan pemaparan pada. Latar belakang, maka penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga keuangan dalam meminimalisir ketimpangan pendapatan di kabupaten sumbawadengan memakai data jumlah

¹ Lady Vironica Janiar and Aris Soelistyo, "Analisis Penguatan Peran Kelembagaan Terhadap Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan Di," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 3 (2017): 352–64.

² Maria Agape Widya Prasetya et al., "Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia," *Analisis* 12, no. 1 (2022): 60–74, <https://doi.org/10.37478/als.v12i1.1137>.

³ Lasmiatun, "Peran Dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/ LKMS Untuk Menciptakan Kesejahteraan Dan Keadilan Distributif," *Dimensi* 10, no. 2 (2017): 36–48, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/download/3760/2761>.

Lembaga Keuangan Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai saran kepada pemerintah untuk meminimalisir ketimpangan pendapatan apakah cukup dengan mengembangkan Lembaga keuangan saja atau dengan cara lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal terbaik. Studi pustaka adalah penelitian yang mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data telah diperoleh dan dianalisis secara kualitatif, informasi kemudian disajikan secara deskriptif, yang berarti menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan masalah yang terkait dengan peranan Lembaga keuangan dalam meminimalisir ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sumbawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antara golongan dalam masyarakat tersebut. Ketimpangan antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Maka perbedaan ini yang membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Smith dan Todaro (2006) ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat.

Kuncoro (2006) pengertian ketimpangan pendapatan ialah standar hidup yang relative pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan factor produksi dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan dalam proses distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara golongan masyarakat atau adanya perbedaan pendapatan antar beberapa daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jarak ketimpangan pendapatan tersebut maka akan semakin besar juga variasi dalam distribusi pendapatan.

Dengan adanya situasi ketimpangan distribusi pendapatan ini, maka menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah, tentu dalam hal ini tidak bisa dihindari karena terdapat efek perembesan kebawah dari pendapatan secara nasional terhadap mayoritas masyarakat yang tidak terjadi secara sempurna. Dengan demikian, hasil output secara nasional hanya dapat dinikmati oleh beberapa golongan minoritas dengan berbagai tujuan tertentu. Lembaga Keuangan Mikro diartikan sebagai lembaga keuangan yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk memberikan jasa dalam hal pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan⁴.

Menurut klasifikasi *World Bank*, masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang sedang, yaitu nilai di atas 0,35 dan di bawah 0,5. Selain itu, menurut Bock, nilai rata-rata rasio gini di atas 0,40 menunjukkan bahwa itu di atas batas wajar. Kelompok-kelompok tertentu mendapat manfaat dari

⁴ I Gde Kajeng Baskara, "LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA," *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 18, no. 2 (2013): 114.

ketidaksamaan ini, sementara kelompok lain mengalami kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa pendapatan riil orang kaya meningkat lebih cepat daripada orang miskin. Akibatnya, ini akan menyebabkan masalah lain terkait kesejahteraan⁵. Pembangunan ekonomi diperlukan untuk mengurangi ketimpangan. Jika sektor finansial tidak berkembang dengan baik, akan memperparah perbedaan antara orang berpendapatan tinggi dan orang miskin. Perkembangan sektor finansial juga dapat berdampak pada alokasi modal, yang tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan permintaan kerja, yang berdampak pada pendapatan masyarakat.

Ketimpangan distribusi pendapatan didefinisikan sebagai perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antar daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang perbedaan pendapatan tersebut maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Adapun beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan antara lain: Indeks Gini, Indeks Theil dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Indeks Gini pun dipilih sebagai indikator ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini. Indeks Gini adalah satu indikator atau ukuran ketimpangan yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai Indeks Gini nol artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna⁶.

⁵ Lenti Canina Odelia Windi Ariesta, Jamzani Sodik, and Didi Nuryadin, "Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Dan Keterkaitan Spasial," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 5 (2022): 737–54, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.79>.

⁶ Anggiat Mugabe Damanik, Zulgani Zulgani, and Rosmeli Rosmeli, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi," *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 7, no. 1 (2018): 15–25, <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4533>.

Pembahasan

Sistem ekonomi dan lembaga keuangan memiliki alat yang dapat mengatasi berbagai masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan. Tetapi ada beberapa hal yang dapat dioptimalkan untuk mencapainya. Hal ini sangat menarik untuk diteliti untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkannya. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan perekonomian adalah dengan menghitung Pendapatan Domestic Bruto (PDB) atau PDRB untuk perekonomian daerah, baik pada dasar harga berlaku maupun konstan. Semakin tinggi PDRB, semakin baik kesejahteraan masyarakat. Namun, kesejahteraan yang dimaksud hanya dapat dicapai jika PDRB yang besar tersebut dinikmati oleh semua anggota masyarakat, bukan hanya beberapa individu atau kelompok tertentu.

Lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam meminimalisir ketimpangan pendapatan di Sumbawa. Ketimpangan pendapatan seringkali menjadi masalah besar dalam masyarakat, karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar. Melalui berbagai inisiatif dan program, lembaga keuangan dapat membantu mengatasi masalah ini dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu cara utama lembaga keuangan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan adalah dengan memberikan akses ke pinjaman usaha mikro dan kecil kepada para pelaku usaha di Sumbawa. Banyak warga di Sumbawa yang memiliki potensi untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil, tetapi sering kali terbatas oleh akses terhadap modal.

Dengan memberikan pinjaman dengan suku bunga yang terjangkau dan persyaratan yang mudah, lembaga keuangan dapat membantu mereka mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, lembaga keuangan dapat memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Banyak dari mereka yang kurang memahami manajemen keuangan pribadi atau manajemen bisnis. Dengan memberikan pelatihan dan sumber daya mengenai hal-hal seperti pengelolaan utang, perencanaan keuangan, dan investasi, lembaga keuangan dapat membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat membantu mereka mengelola pendapatan dengan lebih efektif.

Selain menyediakan akses terhadap layanan keuangan, lembaga keuangan juga dapat berperan dalam menghubungkan bisnis lokal dengan pasar yang lebih luas. Mereka dapat membantu menghubungkan produsen lokal dengan pembeli dan distributor di luar Sumbawa, sehingga membuka peluang untuk ekspansibisnis dan pertumbuhan pendapatan. Dengan demikian, lembaga keuangan tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan secara langsung, tetapi juga mengembangkan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Selain itu, lembaga keuangan dapat mendukung program pengembangan ekonomi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu. Mereka dapat menyediakan dana dan sumber daya untuk proyek infrastruktur, pelatihan kejuruan atau program sosial lainnya yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Di Sumbawa, yang memiliki potensi ekonomi besar namun juga tantangan berat, peran lembaga keuangan sangatlah penting. Mereka dapat

menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan dan menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan kerja sama yang baik dan pendekatan holistik, lembaga keuangan dapat membantu menciptakan perubahan positif yang signifikan terhadap kondisi perekonomian dan sosial Sumbawa.

Beberapa faktor di dalam lembaga keuangan yang dapat menghambat upaya meminimalisir ketimpangan pendapatan antara lain:

1. Kurangnya aksesibilitas dan inklusivitas: Lembaga keuangan mungkin tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah. Hal ini dapat menghambat mereka dalam memanfaatkan layanan keuangan yang dapat membantu meningkatkan pendapatan.
2. Syarat dan ketentuan yang ketat: Beberapa lembaga keuangan mungkin memiliki persyaratan yang ketat untuk meminjamkan uang atau memberikan layanan keuangan lainnya. Hal ini dapat membuat sulit bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau memiliki riwayat kredit yang buruk untuk mendapatkan akses yang mereka butuhkan.
3. Biaya dan bunga yang tinggi: Biaya administrasi yang tinggi atau suku bunga yang tinggi dapat membuat layanan keuangan menjadi tidak terjangkau bagi golongan berpendapatan rendah. Hal ini dapat menghalangi mereka untuk menggunakan layanan keuangan tersebut secara optimal.
4. Kurangnya pendidikan keuangan: Banyak orang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manfaat atau cara

menggunakan produk keuangan yang tersedia. Kurangnya pendidikan keuangan dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengelola keuangan mereka dengan baik dan memanfaatkan produk-produk yang ada untuk meningkatkan pendapatan.

5. Perbedaan budaya atau bahasa: Budaya atau bahasa yang berbeda dapat menjadi hambatan dalam komunikasi dan pemahaman antara lembaga keuangan dan nasabah potensial, terutama di daerah yang memiliki keberagaman etnis atau budaya yang tinggi.
6. Resiko yang lebih tinggi: Lembaga keuangan mungkin enggan memberikan layanan kepada mereka yang dianggap memiliki risiko kredit tinggi atau ketidakstabilan keuangan. Ini dapat menyebabkan mereka yang membutuhkan layanan ini paling tidak dapat mengaksesnya.
7. Ketidaktransparan dan praktik yang tidak adil: Beberapa lembaga keuangan mungkin terlibat dalam praktik yang tidak transparan atau tidak adil, seperti penagihan yang agresif atau biaya tersembunyi, yang dapat merugikan nasabah dan menghambat upaya meminimalisir ketimpangan pendapatan.
8. Ketidakmampuan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil: Lembaga keuangan mungkin tidak memiliki jaringan atau infrastruktur yang cukup untuk menjangkau daerah-daerah terpencil atau pedesaan, di mana ketimpangan pendapatan sering kali lebih besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

Lembaga Keuangan diartikan sebagai lembaga keuangan yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk memberikan jasa dalam hal pengembangan usaha

dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dalam meminimalisir ketimpangan pendapatan di kabupaten sumbawa.

REFERENSI

- Ariesta, Lenti Canina Odelia Windi, Jamzani Sodik, and Didi Nuryadin. "Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Dan Keterkaitan Spasial." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 5 (2022): 737-54. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.79>.
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 12(1), 29-47.
- Baskara, I Gde Kajeng. "LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 18, no. 2 (2013): 114.
- Damanik, Anggiat Mugabe, Zulgani Zulgani, and Rosmeli Rosmeli. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi." *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 7, no. 1 (2018): 15-25. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4533>.
- Janiar, Lady Vironica, and Aris Soelistyo. "Analisis Penguatan Peran Kelembagaan Terhadap Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan Di." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 3 (2017): 352-64.
- Kamilah, K., & Nst, A. I. L. (2019). *Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan dan Distribusi Pendapatan di Kota Medan*. HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ..., 6(1).
- Lacalle-Calderon, M., Larrú, JM, Garrido, SR, & Perez-Trujillo, M (2018). *Keuangan Mikro dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Baru di Tingkat Makro*. *Tinjauan Ekonomi Pembangunan*, 23(2), 860-876.
- Lasmiatun. "Peran Dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/ LKMS Untuk Menciptakan Kesejahteraan Dan Keadilan Distributif." *Dimensi* 10, no. 2 (2017): 36-48.

<https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/download/3760/2761>.

Pradnyadewi T, D., &Purbadharmaja, I.B.P. (2017). *Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali*.E-JurnalEPUNUD, 6(2), 255-285

Prasetya, Maria Agape Widya, Princisca Lutfitasari, Justi Sairo, and Birgitta Dian Saraswati. "Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia." *Analisis* 12, no. 1 (2022): 60-74.
<https://doi.org/10.37478/als.v12i1.1137>.